

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 132 | Tahun XXXV | Januari-Maret 2018

**Sigap dan
Tanggap
Menghadapi
Krisis**

**Menjaga
Stabilitas
Sistem
Keuangan
Indonesia**



**Optimistis Hadapi
Tantangan 2018**

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Perekonomian 2018 Akan Lebih Bergairah



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sempat mengatakan, merealisasikan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang sebesar 5,4% tidaklah mudah. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah ringan di tengah kondisi global yang masih belum menentu.

Menteri Keuangan memastikan, pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4% pada 2018 adalah bukti bahwa pemerintah sangat optimistis. Oleh sebab itu, perbaikan ekonomi nasional harus dijaga momentumnya sehingga dapat menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, hal ini diharapkan akan mengurangi angka kemiskinan. Guna menjaga momentum perekonomian nasional, pemerintah terus mewaspadai risiko, baik dari global maupun domestik. Kondisi geopolitik terkait dengan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) sedikit banyak akan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi kondisi perekonomian negara-negara di Asia.

Berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemerintah akan terus mendorong dan memperkuat seluruh sumber pertumbuhan, di antaranya menggenjot konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien.

Dengan berbagai langkah dan perbaikan yang terus diupayakan, perekonomian Indonesia pada 2018 diyakini akan meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Hal ini pun diyakini segenap pelaku usaha di sektor perbankan. Para pelaku usaha di sektor ini optimistis pertumbuhan bisnis perbankan sepanjang 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Para bankir meyakini perekonomian pada 2018 akan lebih bergairah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan akselerasi ekonomi, antara lain perbaikan harga komoditas yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pemerintah bakal makin fokus pada program padat karya yang dapat memberikan tambahan penghasilan masyarakat desa dalam jangka pendek. Sekarang ini merupakan tahun politik, jadi ada kecenderungan jumlah uang yang beredar akan meningkat dan menggeliatkan ekonomi. Pada gilirannya, geliat ekonomi tersebut akan mendorong peningkatan permintaan kredit oleh masyarakat maupun pelaku usaha lainnya.

Selain potensi peningkatan penyaluran kredit, pelaku perbankan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam menyalurkan kreditnya. Setelah sempat melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas kredit dan menekan tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* yang mengalami peningkatan, kini pelaku perbankan dapat bernapas agak lega karena bisa menekan *NPL*.

Pihak otoritas perbankan menyatakan, perbankan Indonesia memiliki ruang yang lebih baik untuk menyalurkan pinjaman pada 2018 dan meyakini pertumbuhan kredit akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2017. Jadi, permintaan Presiden Joko Widodo agar perbankan lebih agresif lagi dalam penyaluran kredit pun sepertinya akan direspons dengan baik oleh pelaku perbankan pada 2018. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Optimistis Hadapi Tantangan 20183
 Perekonomian pada 2018 diproyeksikan akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Pelaku perbankan harus menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi segala tantangan.



Strategi Bank Menghadapi Tantangan 20186

Selektif Memilih Sektor dan Memperbaiki Kualitas8

Potensi pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 diproyeksikan lebih baik. Kendati demikian, bank mesti selektif dalam memilih sektor yang akan disasar sembari berupaya memperbaiki kualitas kredit.

Aktualita

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia10

Risiko Kredit Perbankan Menurun12

Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga saat ini berdampak pada peningkatan kredit bermasalah bank. Dengan berbagai upaya perbaikan, risiko kredit perbankan ke depan diprediksi makin menurun.

Sigap dan Tanggap Menghadapi Krisis14



Profil

Moch. Hadi Santosa
 Direktur Utama BRI Syariah,
 Wakil Ketua Umum Perbanas,
 Plt Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Tumbuh dan Berkembang Bersama16

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Perlu usaha bersama seluruh bank syariah untuk memaksimalkan potensinya di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini.



Wacana

Reformulasi GWM Averaging20



Sekilas Berita

AFIN Workshop 201822

Tahun Baru Imlek di Perbanas Sumut23

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- Bank Muamalat5
- Bank Victoria7
- Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati.....9
- Bank Artha Graha13
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah15
- Bank BJB Syariah19
- Bank Sahabat Sampoerna21
- Bank Jatim24



Optimistis Hadapi Tantangan 2018

Perekonomian pada 2018 diproyeksikan akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Pelaku perbankan harus menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi segala tantangan.

Sejumlah lembaga, pemangku kebijakan, dan pelaku usaha menyatakan optimismenya terkait dengan perekonomian pada 2018. Perekonomian global maupun domestik diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan dengan 2017. Bank Indonesia (BI) meyakini kondisi perekonomian Indonesia kian membaik. Hal itu ditandai dengan pencapaian inflasi yang rendah sesuai dengan target dalam tiga tahun terakhir, neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing yang tinggi, nilai tukar rupiah yang stabil, cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi, serta stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut diikuti dengan harga komoditas global yang tetap tinggi. Pendorong pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni peningkatan sumber pertumbuhan yang berasal dari negara berkembang. Di negara maju pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) terus berlanjut ditopang sektor konsumsi dan investasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, suku bunga *Fed Fund Rate (FFR)* diperkirakan kembali meningkat disertai dengan penurunan neraca bank sentral sesuai dengan rencana.

Di lain sisi, pemulihan ekonomi Eropa diperkirakan sedikit tertahan dibayangi risiko politik di kawasan. Sementara itu, ekonomi Jepang pada 2018 diperkirakan tumbuh melambat

karena kendala struktural *aging population* dan stimulus fiskal yang kian terbatas.

Di negara berkembang ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh melambat pada 2018 seiring dengan perlambatan investasi akibat kebijakan pengetatan properti dan *deleveraging*. Di lain pihak ekonomi India diperkirakan mulai pulih seiring dengan hilangnya dampak demonetisasi dan penerapan sistem pajak baru.

Secara keseluruhan, terdapat potensi pertumbuhan ekonomi global yang lebih tinggi, terutama terkait dengan dampak positif reformasi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut akan mendorong volume perdagangan dunia dan harga komoditas global, termasuk minyak, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perekonomian Indonesia pada triwulan keempat 2017 tumbuh stabil. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik, bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1%-5,5%.

Pada masa mendatang, BI menilai, di tengah berlangsungnya perbaikan ekonomi global dan terjaganya stabilitas perekonomian domestik terbuka peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui penguatan pelaksanaan reformasi struktural. Kendati demikian, sejumlah risiko masih tetap membayangi dan mesti diantisipasi dengan baik.

Sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, baik yang bersumber dari faktor global terkait dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, geopolitik, dan kenaikan harga minyak dunia maupun dari dalam negeri terutama terkait dengan konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat, dan risiko inflasi.

Untuk meresponsnya, BI akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Selain itu, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah intermediasi perbankan yang belum kuat. Terjaganya stabilitas

sistem keuangan tercermin dari rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) perbankan yang cukup tinggi pada level 23,2% dan rasio likuiditas (*AL/DPK*) pada level 22,3% per November 2017. Sementara itu, sejalan dengan upaya penguatan manajemen risiko kredit perbankan, rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) berada pada level 2,89% (*gross*) atau 1,25% (*net*), lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2017 yaitu sebesar 2,96% (*gross*) atau 1,29% (*net*).

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung. Hal itu tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, meski belum dalam besaran yang diharapkan. Transmisi melalui jalur kredit juga masih belum optimal, yang tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan kredit yang belum tinggi dan perilaku bank yang masih selektif dalam memberikan kredit baru.

Strategi Bank

Menghadapi tantangan bisnis 2018, sejumlah bank di Tanah Air menyiapkan sejumlah strategi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), misalnya, tetap konsisten menjadi integrator untuk industri properti di Tanah Air. BTN optimistis

Presiden Minta Bank Lebih Agresif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri perbankan lebih agresif dalam menjalankan usaha, terutama terkait dengan penyaluran kredit. Presiden juga meminta perbankan untuk berani mengambil risiko, tentunya dengan perhitungan yang matang. Agresivitas perbankan diperlukan untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sedang tumbuh.

Presiden menyampaikan hal itu di hadapan pemimpin sejumlah bank di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Maret 2018. Pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

Presiden mengatakan, ia menerima informasi bahwa perbankan nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. "Atau mungkin bapak ibu sekalian terlalu bermain aman?" tanya Presiden.

Presiden mengimbau para pemimpin bank untuk tidak ragu-ragu masuk zona agresif. Peluangnya terbuka lebar. Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ialah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan usaha rintisan di sektor ini begitu marak dan dapat



diarahkan masuk ke sektor digital. "Arahkan mereka (UMKM), pengaruhilah mereka agar pindah ke platform digital," pinta Presiden.

Untuk masuk zona agresif dibutuhkan keberanian mengambil risiko. Menurut Presiden, bukan kemungkinan buruk yang perlu dikhawatirkan, melainkan hal yang paling berat dan gawat ialah tidak adanya keinginan mengambil risiko.

Presiden menyayangkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang hanya 8,24% pada 2017. Padahal, pemerintah menargetkan kredit perbankan bisa tumbuh 9%-12% pada 2017.

Sementara itu, Wimboh menyebutkan, perbankan Indonesia memiliki ruang yang cukup besar untuk menyalurkan kredit atau pinjaman. Ia meyakini, kredit industri perbankan tahun ini akan tumbuh sekitar 12%.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo, mengakui, tahun lalu adalah periode konsolidasi. Namun, sejalan dengan penurunan rasio kredit macet, tahun ini bank mulai melonggarkan kredit. "Saya rasa pas jika tahun ini kami diminta lebih agresif lagi," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara, Maryono, menyampaikan optimismenya. "Tahun ini harga komoditas mulai membaik, kondisi ekonomi akan membaik sehingga kredit juga akan tumbuh lebih baik," katanya. ■

prospek industri properti pada 2018 akan tetap tumbuh seiring dengan perekonomian Indonesia yang diperkirakan meningkat di atas 5%. Direktur Utama BTN, Maryono, mengatakan, sejumlah sektor pendorong perekonomian akan menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk sektor properti.

“Menghadapi 2018, kami tetap konsisten menjadi integrator untuk industri properti di Tanah Air. Tidak hanya dari sisi permintaan dengan pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR), tapi juga pasokan dengan mengalirkan kredit konstruksi ke pengembang,” ujarnya.

Pada 2018 BTN tidak hanya memperhatikan sisi permintaan dengan pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR), tapi ke depan akan mengencangkan pasokan dengan mengalirkan kredit konstruksi ke pengembang. Maryono mengungkapkan, setidaknya ada empat tantangan dari sektor properti sepanjang 2018. “Tantangan pertama ada di sektor properti. Yang pertama adalah *backlog* atau kekurangan pasokan rumah hingga 13,38 juta unit karena tingginya kebutuhan rumah, namun tidak tercukupi pasokan,” ungkapnya.

Maryono menambahkan, kekurangan pasokan tersebut harus segera terpenuhi. Terlebih dirinya menilai, sektor properti menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi pada 2018. Kemudian, tantangan kedua, tidak tersedianya lahan yang cukup untuk membangun properti. Selanjutnya, tantangan ketiga ialah masalah regulasi pertanahan yang belum berstandarisasi di setiap daerah dinilai masih perlu dibenahi. Yang terakhir ialah sedikitnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk kategori *bankable* sehingga sulit mengakses pembiayaan KPR. Padahal, menurut data BPS,

kalangan MBR dengan penghasilan di bawah Rp3 juta paling banyak membutuhkan tempat tinggal. *Backlog* di MBR informal tercatat mencapai lebih dari 6 juta unit.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BTN terus berusaha menjadi yang terdepan dalam membantu pemerintah merealisasikan program sejuta rumah. Sebagai informasi, BTN juga mengemban amanat dari pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah yang masuk dalam Nawa Cita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Optimisme juga diungkapkan *Senior Vice President Corporate Secretary* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), Hakim Putratama. Ia mengaku optimistis kinerja bisnis Bank BJB dapat tumbuh positif.

Untuk mendorong kinerja keuangan, Bank BJB telah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, menjaga pertumbuhan dana murah atau *current account saving account (CASA)* dan *transactional banking* untuk mempertahankan likuiditas yang *sustainable*. Kedua, meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas serta menekan tingkat rasio kredit bermasalah (*NPL*).

Selain itu, mendorong peningkatan *fee based income*. Lalu, memperkuat permodalan bank dan sinergi bidang penunjang dengan kebutuhan bisnis untuk memperluas ekspansi. Bank BJB juga akan berinovasi dari sisi produk perbankan dan melakukan berbagai kerja sama, di antaranya kerja sama pemasaran produk *bancassurance* dengan perusahaan asuransi dan pengembangan aplikasi penyaluran dana BOS nontunai SiBOS. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8-073.000
Mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2017: Rp. 355.072.210.717,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2017 sebagai lampiran.

Strategi Bank Menghadapi Tantangan 2018

Perekonomian yang diproyeksikan lebih baik pada 2018 akan berdampak pada potensi pertumbuhan bisnis industri perbankan. Para pelaku di sektor ini harus menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pelaku industri perbankan menyambut positif prospek usaha pada 2018. Membaiknya prospek usaha pada tahun ini terkait erat dengan berbagai perbaikan ekonomi, baik global maupun domestik.

Pertumbuhan ekonomi pada 2018 diproyeksikan akan lebih baik ketimbang 2017. Namun, untuk mencapainya

tidaklah mudah. Akan selalu ada bayang-bayang ketidakpastian dan tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di sektor perbankan.

Untuk menggapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik, para bankir telah mencanangkan berbagai strategi untuk memacu bisnis bank yang dikelolanya. Berikut strategi yang diterapkan beberapa bank pada 2018.

Benny Purnomo,
Presiden Direktur MNC Bank

Fokus pada Consumer Banking dan SME

PT MNC Bank Internasional Tbk (MNC Bank) menyatakan pada 2017 lalu telah menyelesaikan tahap *foundation building* dan pada 2018 ini akan memasuki tahap *focusing the business*. Presiden Direktur MNC Bank, Benny Purnomo, menjelaskan bahwa pada tahap ini banknya akan fokus meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) dan nilai transaksi yang fokus pada segmen *consumer banking*, yakni *consumer lending* dan *retail funding* serta *small medium enterprises (SME)* dengan segmen komersial dan korporasi sebagai segmen pendukung.

“Pada tahap ini juga akan memperkuat sinergi dengan MNC Group. Untuk segmen bisnis pada 2018, MNC Bank akan memfokuskan pada segmen ritel, konsumen, serta *SME* dengan target akuisisi ritel keluarga muda yang tinggal di kota besar, berumur 25 hingga 45 tahun, dan *tech savvy*,” terangnya.

Benny juga menjelaskan, untuk jangka pendek, perseroan menargetkan beberapa hal. Beberapa hal yang dimaksud yaitu profitabilitas dengan memperkuat permodalan; akuisisi nasabah untuk menggenjot pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), khususnya dana murah, dengan memperkuat distribusi jaringan melalui digital; maksimalisasi dan penataan kembali jaringan kantor; serta peningkatan infrastruktur.

Perseroan pun akan mempercepat penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan mempertahankan tingkat *non performing loan*



(*NPL*) dengan melakukan penyaluran kredit. Tentunya dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pihak perseroan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*SDM*) serta memperkuat manajemen risiko dan mengelola bank dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

“Untuk target jangka panjang, bank menargetkan kinerja keuangan yang kuat dan berkesinambungan,

peningkatan *customer base*, jaringan distribusi yang kuat dan produktif dengan fokus pada jaringan elektronik, serta manajemen risiko dan tata kelola yang andal dan kuat dalam mendukung pertumbuhan bisnis,” jelasnya.

Saat ini MNC Bank sudah melayani nasabah di Medan, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Tarakan, Samarinda, dan Makassar. “Pada 2018 kami akan lebih memaksimalkan peran dan fokus dari masing-masing jaringan kantor serta melakukan relokasi beberapa kantor sehingga lebih strategis dalam menjangkau dan melayani nasabah,” ucapnya.

Eko Rachmansyah Gindo,
Direktur Utama Bank Bukopin
Menekan NPL

Eko Rachmansyah Gindo resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin), menggantikan Glen Glenardi yang mengundurkan diri. Eko Gindo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan Bank Bukopin diharapkan dapat memperbaiki kinerja perseroan, baik dari sisi kredit bermasalah (NPL) maupun laba perusahaan.

Sebagai informasi, kredit bermasalah Bank Bukopin sampai dengan September 2017 tercatat sebesar 4,87% (gross), mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2016, yakni 3,37%. Namun, dari sisi laba sebelum pajak (bank only), laba Bank Bukopin tercatat tumbuh negatif sebesar 25,18%, yakni dari Rp1,05 triliun pada September 2016 menjadi Rp782,46 miliar pada September 2017.

Untuk perbaikan, Eko Gindo bersama manajemen lainnya telah menyiapkan langkah strategis. Dalam rencana bisnis bank (RBB), perseroan menargetkan NPL dapat ditekan di bawah 3,5% hingga akhir 2018. Target NPL ini masih sama dengan target NPL pada tahun lalu.

NPL yang tercatat sebesar 4,87% pada September 2017 itu masih dominan disumbang oleh sektor tambang batu bara. Menurut Eko Gindo, ada beberapa strategi untuk menurunkan kredit bermasalah di sektor batu bara sehingga nantinya akan



menekan NPL perseroan pada 2018. Salah satu langkahnya, perseroan berniat akan menjual aset bermasalah di sektor batu bara.

“Kita mulai produksi. ‘Kan ada dua batu bara, yang satu sudah dijual (alat-alat tambang), mulai lancar lagi kolektibilitasnya. Jadi, NPL yang sudah membaik sebesar Rp250 miliar, sisanya Rp700 miliar diharapkan tahun ini bisa diselesaikan. Harus bertahap,” ungkapnya.

Selain melakukan penjualan aset bermasalah, perseroan akan melakukan berbagai upaya untuk menekan NPL. Salah satunya dengan merestrukturisasi kredit sampai dengan melakukan penagihan terhadap debitur-debitur. “Itu dikombinasikan. Secara sukarela kasih jaminannya itu dikombinasi, yang akan dilakukan selain tumbuh kredit yang kecil ritel tadi,” ucapnya.

Sementara itu, dari sisi kredit, perseroan menargetkan dapat tumbuh di kisaran 5% pada 2018 atau masih sejalan dengan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang dipatok pada kisaran 5%-7%. Diharapkan dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang mengalami perbaikan tersebut akan ikut menopang laba perseroan hingga akhir 2018.



DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto maka dengan ini PT Bank Victoria International Tbk mengumumkan daftar piutang tersebut sebagai berikut :

Tahun 2017 Sebesar Rp. 255.303.583.300,-

NO.	NAMA	NPWP	ALAMAT	PLAFOND YANG DIBERIKAN	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
1	PT Arjuna Finance	013430889029000	Komplek Duta Merlin Blok A No. 11-12 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	24.904.561.026	19.358.613.892
2	PT Citra Mutiara Bestari	032599581086000	Komplek Puri Niaga II, Jl. Puri Kencana Blok J1 No. 2J, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta.	24.000.000.000	18.999.385.205
3	PT Dharma Putra Trans	023536113904000	Jl. By Pass Ida Bagus Mantra No. 234 X Kel. Banjar Luglug Ketewel, Kec. Sukawati Denpasar, Bali.	137.000.000.000	124.274.150.000
4	Harso Utomo Suwito	083211087701000	Apartemen Puri Garden Unit No. 3, RT.001/RW.02, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta.	14.700.000.000	13.550.747.327
5	Jonatan	783001092402000	Vila Tomang Baru, Blok B-2 No.1, RT 006 RW 013 Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Tangerang, Banten	2.310.000.000	1.882.756.122
6	Koperasi Simpan Pinjam Barera	318008968418000	Vila Tomang Baru, Blok B-2 No. 1, RT 006 RW 013 Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Tangerang, Banten.	10.000.000.000	8.091.945.599
7	PT Sarana Pundi Utama	030148704063000	Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jl. Pintu Lima, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	49.000.000.000	49.000.000.000
8	CV Sundoro Asia	021080726432000	Jl. Raya Jatibening, RT 006 RW 01Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat	16.183.063.805	13.501.099.032
9	Wingki Waluyo Kushadi	087796314003000	Jl. Cipinang Baru III No. 24A, RT 002 RW 02, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, DKI Jakarta	11.700.000.000	6.644.886.123
JUMLAH				289.797.624.831	255.303.583.300

Rincian daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana diatas akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak - Pajak Masuk Bursa sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017.

Selektif Memilih Sektor dan Memperbaiki Kualitas

Potensi pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 diproyeksikan lebih baik. Kendati demikian, bank mesti selektif dalam memilih sektor yang akan disasar sembari berupaya memperbaiki kualitas kredit.



Pertambangan batu bara; NPL berpotensi naik

Sepanjang 2017 pelaku perbankan nasional mengalami tekanan yang cukup kuat dalam mengembangkan bisnis, terutama terkait dengan penyaluran kredit. Permintaan kredit perbankan menurun. Hingga November 2017, kredit hanya tumbuh 7,47% (*year on year*) atau hingga akhir tahun diproyeksikan hanya mencapai 7,5%-8,5%.

Melemahnya permintaan kredit disebabkan oleh iklim bisnis yang kurang baik. Sebab, dari sisi suplai cukup berlimpah. Ditambah lagi suku bunga acuan dalam dua tahun terakhir menurun sebesar 200 *basis points* (*bps*), yang berpengaruh pada penurunan suku bunga kredit. Memang penurunannya masih relatif lebih lambat ketimbang suku bunga dana.

Merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ada peningkatan *gap loanable funds* (untuk melihat dana yang bisa disalurkan sebagai kredit) dengan penyaluran kredit yang makin melebar. Pada triwulan/kuartal ketiga 2017 *gap* melebar menjadi Rp704 triliun, padahal pada posisi yang sama 2016 dan 2015 masing-masing hanya Rp514 triliun dan Rp400 triliun.

Penyaluran kredit juga agak terhambat karena bank masih fokus membersihkan aset bermasalah dan sangat selektif

menyalurkan kredit agar tidak menekan kredit bermasalah atau *non performing loan* (*NPL*) baru. Selain itu, di beberapa segmen, seperti komersial, ada masalah *cash flow* dan likuiditas.

Sejauh ini kualitas kredit dinilai membaik dan *NPL* menurun. Hingga November 2017, *NPL* berada pada level 2,89% dan pada November 2016 berada pada posisi 3,18%.

Melihat kondisi yang terjadi, Andry Asmoro, ekonom Bank Mandiri, menyatakan semestinya pelaku perbankan optimistis dalam mengaruhi dan menghadapi 2018. Dalam tulisannya, "Peluang dan Tantangan Perbankan", Andry memperkirakan pertumbuhan dan kualitas kredit perbankan pada 2018 akan lebih baik. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sebesar 5,3%. Dengan demikian, kredit perbankan bisa tumbuh sebesar 10%-11% pada 2018.

Akan tetapi, menurutnya, bank mesti tetap hati-hati, mengingat bank tengah giat melakukan restrukturisasi dan risiko kredit (*loan at risk*) masih cukup tinggi yang dapat menimbulkan kredit bermasalah. Bank harus menjalankan strategi yang jitu, misalnya memilih sektor dan segmen yang tepat, mengingat masih ada beberapa sektor yang perlu diwaspadai.

Masih ada sektor yang menunjukkan kenaikan *NPL*, antara lain pertambangan. Sektor ini pada Oktober 2017 meningkat hingga 8,14%, tertinggi sejak Februari 2007. Meski *NPL* sektor pertambangan turun menjadi 7,18% pada November 2017, ke depan diperkirakan berpotensi naik, terutama di segmen komersial. Banyak perusahaan segmen ini memiliki permasalahan operasional.

Sementara itu, dari sisi likuiditas perbankan diperkirakan masih relatif stabil, walaupun pertumbuhan kredit pada 2018 akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendanaan, dalam hal ini dana pihak ketiga (*DPK*). Secara umum, likuiditas rupiah perbankan dipengaruhi terutama oleh siklus fiskal pemerintah dan aliran modal asing. Tahun lalu jumlahnya mencapai Rp250 triliun, yang kemungkinan besar akan berulang pada tahun ini. Secara historikal, belanja pemerintah meningkat lebih tinggi setahun menjelang pemilihan presiden.

Tantangan justru akan datang dari sisi aliran modal asing, terkait dengan adanya beberapa kebijakan pengetatan sejak tahun lalu. Namun, diyakini hingga saat ini aliran modal asing masih akan masuk ke Indonesia. Apalagi jika *rating* Indonesia kembali di-*upgrade* Moody's.

Langkah berikutnya yang bisa dilakukan bank dari sisi likuiditas ialah mencari sumber pendanaan melalui pasar modal. Bank misalnya bisa menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sektor infrastruktur yang bertenor panjang.

Andry menyimpulkan, pada 2018 industri perbankan dapat berlari lebih kencang. Namun, berkaca pada pengalaman 2017, sangat penting memberikan stimulus permintaan atau industri agar bertumbuh lebih cepat, apalagi di tengah tahun politik. Perbaikan prospek bisnis menumbuhkan kepercayaan diri pelaku industri untuk lebih ekspansif dan akhirnya mendorong permintaan kredit perbankan.

Mendorong Pertumbuhan

Tantangan perekonomian, khususnya pertumbuhan bisnis bank, terkait erat dengan kondisi global. Salah satu yang mesti dicermati otoritas terkait dan pelaku usaha di sektor perbankan ialah kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau *Fed Fund Rate (FFR)*.

Sejalan dengan kebijakan pendahulunya, Jerome Powell yang disebut-sebut akan menggantikan Janet Yellen sebagai Gubernur Bank Sentral AS (The Federal Reserve) diprediksi akan melakukan perubahan suku bunga acuan *FFR*. Suku bunga acuan Bank Sentral AS diperkirakan akan mengalami

peningkatan sebanyak empat kali sepanjang 2018, tergantung pada perkembangan ekonomi AS.

Menurut Paul Sutaryono, pengamat perbankan, dalam sebuah tulisannya berjudul "Tantangan Perbankan 2018", yang dimuat harian *Kompas*, 14 Desember 2017, tatkala target pertumbuhan ekonomi AS tercapai, *FFR* akan melaju dari 1%-1,25% hingga 2%.

Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang berwenang harus mencermati secara jeli perkembangan suku bunga acuan tersebut. Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, BI sepatutnya menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Repo Rate pada level 4%. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dana asing agar tak terlalu banyak pulang kampung. Respons ini juga bermanfaat untuk menahan agar pelemahan nilai tukar rupiah tak terlalu dalam ketika pasokan dolar AS tertekan.

Kenaikan *FFR* dinilai akan menjadi kendala bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit lebih rendah lagi. Padahal, pemerintah memasang target suku bunga kredit satu digit.

Melihat kondisi yang terjadi, Paul menilai ke depan bank perlu pula menggeber kredit ke sektor yang berbasis padat karya. Katakanlah sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan cukup bagus dan tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah. Kemudian, ada sektor *real estate*, industri pengolahan, dan transportasi.

Selain memiliki potensi yang bagus, dengan mengembangkan kredit pada sektor ini tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Pada akhirnya akan mendorong perekonomian nasional. ■



SK : 307 / BH / MENEG.1 / IX / 2018



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2017: Rp20.588.437.030,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di KSP SMS, akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tengah diuji. Butuh strategi dan konsistensi untuk melanjutkan pertumbuhan menuju negara besar.

Dari segi makro-ekonomi, Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka tentu tidak bisa melepaskan diri dari kondisi ekonomi global. Apa yang terjadi dengan kondisi ekonomi dunia dampaknya bisa sampai ke Indonesia.

Krisis yang melanda dunia pada 2008 sampai sekarang dampaknya belum pulih sepenuhnya. Untuk memulihkan ekonominya, negara-negara maju mengambil kebijakan moneter yang *ultra-easing*. Sebagai contoh Amerika Serikat (AS). AS menurunkan suku bunga *Fed Fund Rate (FFR)* dari kisaran 5% lebih pada 2008 sampai mendekati 0% atau tepatnya 0,25% pada awal 2009. Kebijakan itu terus dipertahankan hingga 2015. Pada praktiknya, dalam kebijakan ini, uang digelontorkan dan murah.

Kebijakan itu rupanya diikuti negara-negara Eropa dan Jepang yang turut menurunkan tingkat suku bunganya mendekati nol atau bahkan minus. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya untuk membangkitkan perekonomian sulit, karena krisis yang dialami tergolong besar.

Melewati 2015, pertumbuhan ekonomi dunia berangsur-angsur mulai pulih. Ditandai dengan tumbuhnya ekonomi AS melalui sektor konsumsi dan investasi. Begitu juga dengan negara-negara Eropa lewat pertumbuhan sektor konsumsi dan ekspor. Raksasa-raksasa Asia, seperti Jepang, Tiongkok, dan India, pun tak ketinggalan, mulai membaik perekonomiannya.

Perekonomian dunia sejak 2015 memang mulai ada perbaikan, tapi masih terus terkoreksi. Baru pada 2017 mulai terlihat perbaikan, diperkirakan sekitar 3,7%. Sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi sempat berada di kisaran 4%-5%. Pada Januari 2018 ada koreksi pertumbuhan dari 3,6% menjadi 3,8%, sementara 2019 diperkirakan mencapai sekitar 3,9%.



Membaiknya perekonomian dunia jelas menguntungkan bagi Indonesia, terutama didukung oleh kenaikan harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia. Secara rata-rata, harga komoditas naik selama 2017 sebesar 22%. Tidak terkecuali dengan harga minyak dunia yang juga turut meningkat. Alhasil, volume perdagangan Indonesia bergerak positif dari 1,4 menjadi 4,5.

Pada 2017 perekonomian tumbuh sebesar 5,07%. Meskipun pelan—pada 2015 tumbuh sebesar 4,9% dan 2016 sebesar 5,0%—hal itu masih menunjukkan perbaikan. Seiring dengan kenaikan harga komoditas, pertumbuhan pada 2017 memunculkan sektor investasi dan ekspor sebagai kontributor utama, di luar konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penggerak utama.

Dengan membaiknya kondisi perekonomian dunia pada 2018, Bank Indonesia (BI) memperkirakan perekonomian akan tumbuh di kisaran 5,1%-5,5% sepanjang tahun tersebut.

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural menjadi kunci utama meraih pertumbuhan. Jika komitmen reformasi struktural terus dilakukan, pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran yang tinggi.

Dari sisi stabilitas makro, indikator pertumbuhan ekonomi seperti pengelolaan inflasi, nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, cadangan devisa, fiskal, serta transaksi berjalan, semua memperlihatkan sinyal positif. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa semua masih terkendali dengan baik.

Laju inflasi selama tiga tahun terakhir cukup stabil, selalu berada dalam target 4% dengan deviasi $\pm 1\%$. Padahal, dua tahun sebelumnya secara berturut-turut tingkat inflasi berada di kisaran 8,3%. Tingkat suku bunga BI (*BI Rate*) juga sudah tidak berdasarkan dana satu tahun. Pada 2016 BI mengeluarkan kebijakan *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan baru, yang saat ini berada di kisaran 4,25%.

Terkait dengan stabilitas sistem keuangan, transaksi perbankan cukup aktif dan tingkat kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) terjaga dengan baik. Bahkan, per Desember 2017, *NPL gross* turun ke 2,6%, sementara *NPL nett* ada di kisaran 1,2%. Per akhir Januari 2018 memang terjadi peningkatan, tapi masih di bawah 3%.

Dilihat dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga terlihat baik. Rasio kecukupan modal industri berada pada kisaran 23%, jauh di atas persyaratan minimum sebesar 8%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa industri perbankan dalam keadaan baik.

BI: Benteng Perbankan Makroprudensial

Pada masa lampau, BI mempunyai tugas di empat area: pengelolaan sistem moneter, peredaran uang di seluruh Indonesia, bertanggung jawab atas sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Akan tetapi, fungsi pengawasan bank pada 2011 dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan undang-undang (UU) OJK.

Namun, bukan berarti BI lepas tangan begitu saja. UU OJK menyatakan, pengawasan bank makroprudensial dipindahkan dari BI ke OJK. Jadi, pengawasan bank secara individu, seperti likuiditas, modal, aktivitas, dan kualitas kredit, memang kini menjadi wewenang OJK. Akan tetapi, BI masih mempunyai tugas untuk mengawasi bank secara makroprudensial.

Tugas tersebut memberikan wewenang kepada BI untuk menggali potensi risiko sistemik dan/atau *interconnectedness*

serta *procyclical* di industri perbankan. Dari beragam kebijakan tersebut, ada beberapa kebijakan makroprudensial yang cukup menarik.

Pertama, penyesuaian *loan to value (LTV)*. Kebijakan ini dikeluarkan BI melihat agresifnya pembiayaan untuk properti dan sepeda motor. Melalui kebijakan ini, BI ingin menyesuaikan jumlah pinjaman supaya lebih rendah dibandingkan dengan nilainya. Ketika industrinya terbukti terjaga, seperti *NPL* tidak meningkat, *LTV* kembali disesuaikan, sehingga semua perbankan dan pengembang bisa tumbuh dengan cepat dan baik.

Kedua, kebijakan *countercyclical capital buffer*. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menahan laju ekspansi perbankan



Usaha mikro, kecil, dan menengah; NPL perbankan terjaga

secara besar-besaran sehingga penyertaan modal menurun. Melalui beleid ini, BI mensyaratkan penambahan modal bagi bank yang ingin berekspansi. Penambahan modal ini dimaksudkan sebagai payung untuk menjaga risiko yang mungkin terjadi.

Kebijakan ini disangga oleh kebijakan penyangga likuiditas makroprudensial. Kebijakan ini mensyaratkan *secondary reserve*, empat persen dari dana pihak ketiga (DPK) harus ditempatkan dalam surat-surat berharga negara atau surat-surat berharga BI. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank ada likuiditas yang cukup. Jika suatu saat ada kekurangan dana, surat berharga tersebut bisa direpokan, untuk menjaga likuiditas.

Ketiga, baru-baru ini BI mengesahkan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial. Bank didorong untuk bisa menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Ini berarti rasio yang ideal berada di antara 80% sampai dengan 92%. Melalui kebijakan ini, bank yang rasionya di bawah atau di atas rasio tersebut akan diberikan disinsentif.

Meskipun tidak populer, kebijakan tersebut sangat penting. Belajar dari pengalaman sebelumnya, perbankan bisa menangani dengan baik permasalahan operasional yang muncul. Akan tetapi, saat terkena masalah likuiditas sudah tidak bisa berbuat apa-apa. BI harus meyakinkan bank agar mengelola likuiditasnya dengan baik. Begitu juga dengan pengelolaan risiko dengan penyertaan kredit.

Disarikan dari kuliah umum Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, dalam acara Dies Natalis Ke-49 Perbanas Institute pada 21 Februari 2018.

Risiko Kredit Perbankan Menurun

Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga saat ini berdampak pada peningkatan kredit bermasalah bank. Dengan berbagai upaya perbaikan, risiko kredit perbankan ke depan diprediksi makin menurun.

Perbaikan ekonomi, baik global maupun domestik, berdampak pada perbaikan kinerja industri perbankan sepanjang 2017, walau capaiannya memang masih di bawah target yang dicanangkan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelaku industri perbankan nasional terus berusaha melakukan perbaikan dan konsolidasi. Melalui upaya tersebut, tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) dan risiko kredit bank mulai menurun.

Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tingkat risiko kredit perbankan sudah menunjukkan penurunan pada awal 2018. Hal itu tercermin dari membaiknya risiko kredit dan rasio kredit bermasalah pascarestrukturisasi pinjaman oleh industri perbankan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah. Menurutnya, rasio risiko pinjaman pada Januari 2018 menurun menjadi 9,6% dari 11,9% pada triwulan ketiga 2017. “Pada Januari 2018 kami mencatat tingkat *credit at risk* perbankan mengalami perbaikan menjadi sebesar 9,6%,” ujar Halim.

Walau tergolong masih relatif tinggi, Halim meyakini, risiko kredit akan terus menurun lantaran bank akan melanjutkan restrukturisasi dan upaya perbaikan aset lainnya. Debitur korporasi juga akan melanjutkan konsolidasi dan bersiap melakukan ekspansi, sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Di lain sisi, rasio kredit bermasalah pada akhir 2017 turun menjadi 2,59% (*gross*) dari 2,92% pada posisi akhir 2016. Penurunan *NPL* ini juga seiring dengan restrukturisasi dan hapus buku yang dilakukan perbankan.

Meski tingkat *NPL* bank menurun, LPS mencatat, *loan at risk* atau risiko kredit masih cukup tinggi. Risiko kredit ini dihitung dengan menjumlahkan kredit kolektabilitas 2 hingga 5 dengan kredit yang direstrukturisasi.

Di samping itu, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan meningkat karena tekanan dari rasio kredit bermasalah menurun dan konsumsi domestik diprediksi membaik. Pertumbuhan kredit pada 2018 diproyeksikan berada di kisaran 12%, sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan kredit pada 2017.



Industri baja; bersaing produk impor

Menurut Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat kredit bermasalah yang cukup signifikan ini terjadi karena sebagian *NPL* sudah direstrukturisasi dan dilakukan hapus buku. “Proses restrukturisasi dan hapus buku membuat kredit keluar dari pembukuan bank,” jelas Wimboh.

Sektor yang Mesti Diwaspadai

Meski risiko kredit perbankan mencatatkan tren penurunan, industri perbankan nasional masih harus mewaspadai potensi pemburukan kualitas kredit di sejumlah sektor. Menurut Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mandiri, Ahmad Siddik Badruddin, beberapa sektor masih memiliki risiko yang patut diperhatikan tahun ini. “Sektor yang masih berisiko tinggi antara lain industri baja/logam dan industri plastik,” katanya.

Mengapa sektor tersebut dinilai berisiko? Hal ini terkait dengan rencana penerapan cukai plastik yang tentu akan berdampak pada industri plastik dalam negeri. Sedangkan, industri baja domestik juga mendapatkan gempuran dari produk-produk impor. Alhasil, tahun lalu sejumlah perusahaan baja skala besar mencatatkan kerugian.

Meski demikian, Siddik melihat kualitas kredit di sejumlah sektor lain akan mengalami perbaikan tahun ini, seperti sektor

consumer goods serta batu bara dan industri pendukungnya. Perbaikan debitur di sektor tersebut diharapkan akan menurunkan rasio *NPL* sehingga rasio *credit at risk* secara keseluruhan diproyeksikan menurun.

Sebagai informasi, hingga posisi akhir tahun lalu, *credit at risk* Bank Mandiri berada di level 11%. Pada 2018 risiko kredit diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga level 10%.

Untuk meminimalisasi risiko kredit, Bank Mandiri memiliki sejumlah strategi. Di antaranya, menambah *booking* kredit di sektor yang berisiko rendah, seperti infrastruktur dan perkebunan sawit; melakukan *early restructuring* untuk debitur yang trennya memburuk; serta mengefektifkan *collection* atau lelang terhadap debitur-debitur bermasalah.

Sementara itu, menurut Nixon Napitupulu, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN), *credit at risk* BTN di bidang konstruksi dan perumahan juga diperkirakan mengalami perbaikan. Melihat perkembangan dan kondisi yang ada, Nixon meyakini, kualitas kredit sepanjang 2018 akan lebih baik. Hal ini sejalan dengan *outlook* perekonomian yang diharapkan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

“Pada 2018 rasio *NPL* diharapkan menurun. Kami proyeksikan pada akhir tahun bisa di bawah 2,5%, dan



Ahmad Siddik Badruddin; masih berisiko

untuk kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) Bank BTN juga bisa turun di bawah 8%,” terang Nixon.

Sebagai informasi, berdasarkan kinerja keuangan (*unaudited*) BTN, per akhir 2017 posisi *NPL* BTN berada di angka 2,61%. Sementara, kredit dalam perhatian khusus tercatat 8,7%.

Untuk menjaga rasio kredit tetap di level yang ditargetkan, BTN melakukan banyak perbaikan, termasuk dari sisi *collection management system*. Selain itu, perseroan memperbaiki berbagai proses bisnis yang saat ini dilakukan lewat program transformasi BTN di

kantor cabang. “Penyelesaian *NPL* juga jadi fokus kami, terutama penyelesaian *NPL* KPR,” tutur Nixon.

Hal senada diungkapkan Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega. “Tahun 2018 pasti akan turun karena 2017 saja *NPL* kami sudah turun. *NPL gross* per akhir Desember membaik menjadi 2% dari 3,4% pada Desember 2016,” jelas Kostaman.

Dari segi sektor yang dibiayai, Bank Mega memang masih mewaspadai sejumlah sektor, antara lain pertambangan dan *multifinance*. Meski demikian, perseroan akan tetap menyalurkan kredit ke sektor tersebut secara lebih selektif. ■

AG BANK ARTHA GRAHA

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009, dengan ini PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut:

Tahun 2017: Rp.67.320.074,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

Sigap dan Tanggap Menghadapi Krisis

Krisis menjadi pelajaran penting dalam lintasan sejarah. Dari kejadian itu, berbagai perbaikan dan mitigasi bisa dilakukan.

Ingatan akan krisis keuangan yang melanda pada 1997/1998 yang kemudian disusul krisis pada 2008 menjadi momok untuk Indonesia dan dunia global. Untuk mencegah agar tidak menjadi “krisis sepuluh tahunan”, lembaga keuangan harus turut andil dalam pencegahannya. Alasan ini pula yang mendasari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengadakan International Seminar on Bank Restructuring and Resolution bertajuk “20 Years of Asian Financial Crisis: Strengthening Infrastructures for Financial Crisis Resolution” bersama dengan Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), di Jakarta pada 28 Februari 2018.

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) di Bali, pada Oktober 2018 mendatang. Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah, berharap, seminar ini dapat memberikan solusi dan jawaban untuk mengantisipasi krisis perekonomian nasional di berbagai negara. Fokus pembahasan tema ialah bagaimana memperkuat infrastruktur ekonomi untuk ekonomi yang lebih tangguh melawan krisis keuangan.

“LPS memilih tema ini karena krisis keuangan Asia dan global telah menunjukkan kepada kita pentingnya restrukturisasi bank untuk menipiskan dampak krisis terhadap perekonomian. Namun, baik literatur akademik maupun dokumen teknis tentang restrukturisasi perbankan masih relatif jarang. Dengan demikian, kami bertujuan untuk mengisi celah melalui seminar ini,” jelas Halim.

Lebih jauh Halim menyampaikan, salah satu perubahan yang paling menonjol ialah kenaikan jumlah negara yang menerapkan sistem penjaminan simpanan secara eksplisit. Jika pada 1974 hanya ada 12 negara dengan sistem asuransi simpanan eksplisit, saat ini sudah ada 139 negara yang telah mengadopsi sistem penjaminan simpanan dan 29 negara sedang mempertimbangkan penerapan sistem.

Kepala Penasihat Komisi Regulasi Perbankan Tiongkok, Andrew Sheng, menyatakan bahwa krisis keuangan Asia pada 1997 dan krisis keuangan global 2008 meninggalkan tiga pesan. Pertama, setiap pemangku kepentingan harus senantiasa siap. Kedua, krisis adalah peristiwa, sementara restrukturisasi merupakan proses yang membutuhkan waktu. Ketiga, eksekusi atau dieksekusi.



Seminar LPS; andil lembaga keuangan

“Ketika krisis makin kompleks dan baru, hal yang bisa disiapkan ialah mengingat prinsip-prinsip dasar. Ingat, tidak ada krisis yang sama,” tegas Andrew mengingatkan.

Terlebih lagi, dibandingkan dengan krisis sebelumnya, faktor pemicu krisis keuangan akan makin kompleks seiring dengan munculnya beberapa faktor baru, seperti digitalisasi ekonomi, geopolitik, dan perubahan iklim. Layaknya perang, Andrew memberikan contoh, ketika peluru pertama ditembakkan, siasat perang tidak lagi berguna. Semua bergantung pada jenderal, kapten, dan serdadu di lapangan.

Program Restrukturisasi Perbankan

Sebagai bagian dari jaringan pengamanan sistem keuangan Indonesia, LPS melalui Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan (PPKSK) Nomor 9 Tahun 2016 memperluas fungsinya untuk menjamin simpanan bank dan sebagai otoritas resolusi. Selain menampung premi simpanan sebesar 0,2%, melalui beleid ini, bank akan diwajibkan membayar premi baru untuk Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Salah satu aspek yang didiskusikan yaitu penentuan besaran premi dan metode penghitungannya. Seperti diketahui, undang-undang LPS meminta adanya target 2,5% dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk dana penjaminan. Saat ini besarnya baru sekitar 1,7% hingga 1,8% dari DPK. Jika premi simpanan dibagi untuk premi PRP, target tersebut akan makin sulit. ■

Peran Aktif Bankir

Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, yang juga Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menilai *recovery and resolution plan (RRP)* perbankan di Indonesia perlu terus diperkaya dengan melibatkan para pelaku industri. Terlebih lagi, saat ini rencana tersebut masih berada pada tahap yang sangat awal sehingga ketentuan untuk rencana aksi pemulihan saat krisis akan makin detail dalam diskusi yang lebih mendalam.

Menurut bankir yang akrab disapa Tiko ini, *exercise* yang rutin digelar atas berbagai indikator rencana pemulihan, baik mencakup permodalan, likuiditas, profitabilitas maupun kualitas aset bank, akan menguntungkan karena memiliki berbagai pilihan rencana untuk keluar dari situasi krisis. Akan tetapi, menurutnya, *benchmark* yang telah dibuat oleh regulator masih perlu diperkaya dengan melibatkan pemerintah dan bank.

“*RRP* ini lebih seperti *framework* dan itu harus *do-able enough*, tapi harus ada *room* untuk improvisasi selama krisis karena tidak bisa *precises* sebab teori-teori ini bisa saja tiba-tiba tidak berjalan dalam kenyataan jika krisis terjadi,” tutur Tiko.

Selain itu, Tiko menambahkan, ketentuan penerbitan surat utang atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi



Kartika Wirjoatmodjo;
melibatkan pelaku industri

permodalan alias *convertible bond* masih menimbulkan tanda tanya. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Melalui aturan tersebut, OJK mewajibkan bank yang masuk dalam

kategori sistemik menetapkan opsi pemulihan berupa penambahan modal dan mengubah modal atau investasi tertentu menjadi modal (*konversi ulang/write off*) atau dikenal dengan mekanisme *bail-in*. Namun, sampai dengan saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab regulator.

“Misalnya, kalau punya *capital adequacy ratio (CAR)* di atas 20%, apakah kita masih perlu *issue convertible bond*? Ataukah *convertible bond* itu menjadi *trigger* ketika *CAR* berada di level tertentu?” terang Tiko. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Bank Jateng mengumumkan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih semester II tahun 2017 sebagai berikut :

Semester II Tahun 2017 Rp 5.651.662.715

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

Moch. Hadi Santoso,
Direktur Utama BRI Syariah,
Wakil Ketua Umum Perbanas,
Plt Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Tumbuh dan Berkembang Bersama

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Perlu usaha bersama seluruh bank syariah untuk memaksimalkan potensinya di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini.

Setelah 26 tahun beroperasi, sejak pertama kali diperkenalkan pada 1992, bank syariah terus tumbuh di industri perbankan Tanah Air. Meskipun pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah terbilang masih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yakni hanya 5,4%, ruang perbankan syariah untuk tumbuh masih terbuka lebar, mengingat potensi pasarnya yang sangat besar.

Tak heran, saat perbankan konvensional hanya mampu tumbuh satu digit, banyak bank syariah yang justru mencatatkan pertumbuhan dua digit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, aset perbankan syariah pada akhir 2017 tumbuh 24,4% menjadi Rp379,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama 2016.

Kinerja perbankan syariah mulai memasuki tahap kebangkitan setelah mengalami masa perlambatan beberapa tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2018, pertumbuhan pembiayaan dan pendanaan bank syariah dipastikan akan terus meningkat.

Lantas, bagaimana kondisi perbankan syariah pada 2018? Tantangan dan peluang apa saja yang harus dihadapi? Berikut ini pandangan Moch. Hadi Santoso, Direktur Utama BRI Syariah yang juga Wakil Ketua Umum (Bank Umum Syariah) Perbanas dan Plt Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), kepada *Probank* di sela-sela kesibukannya. Petikannya:



Bagaimana pandangan Anda terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah di Tanah Air saat ini?

Secara umum, industri perbankan syariah memiliki peluang untuk terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang relatif kecil, yaitu sekitar 5,4%, menunjukkan bahwa potensi perbankan syariah untuk berkembang sangat terbuka lebar.

Pada 2017 pertumbuhan perbankan syariah relatif lebih baik daripada perbankan konvensional. Industri perbankan nasional konvensional tumbuh satu digit dengan penyaluran kredit perbankan hingga November 2017 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,8%. Demikian juga dengan pertumbuhan aset yang pada 2017 terealisasi sebesar 9,2%, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) pada 2017 tumbuh 8,7%.

Sementara itu, di tengah makro-ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih, pembiayaan bank syariah masih mampu tumbuh dua digit. Pada 2017 pembiayaan tumbuh hingga 15,2%. Demikian juga dengan pendanaan, di mana penghimpunan DPK masih tumbuh hingga mencapai 19,8% dan aset tumbuh sebesar 18,9%.

Hanya, pertumbuhan pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendanaan menahan *FDR* (*finance to deposit ratio*) tetap di angka 79%. Angka ini di bawah *LDR* (*loan to deposit ratio*) perbankan konvensional yang mencapai 89%.

Apa saja tantangan yang harus diantisipasi pada 2018?

Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah pada 2018 adalah bagaimana agar perbankan syariah dapat beroperasi secara lebih efisien dan di lain sisi tetap terus melakukan perbaikan tingkat kualitas pembiayaan yang disalurkan. *Non performing financing (NPF)* perbankan syariah masih relatif tinggi, di angka 4,12%. Padahal, perbankan konvensional hanya di kisaran 2,96%.

Tantangan lain yang harus dijawab seiring dengan perkembangan akhir-akhir ini adalah bagaimana perbankan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan dan *financial technology (fintech)*. Selain itu, perbankan syariah masih harus berjuang untuk membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Sebagaimana diketahui, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO) perbankan syariah masih tinggi, per September 2017 sebesar 79%.

Selain tantangan-tantangan tersebut, masih terdapat satu tantangan yang hadir sejak lama, yaitu masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Kurangnya literasi perbankan syariah salah satunya dilatarbelakangi oleh pelaku bank syariah yang terlalu fokus pada operasional bank. Sehingga, tanpa kita sadari, banyak orang yang belum mengerti tentang keuangan syariah, meskipun mereka tahu ada.

Sejauh ini, seperti apa persaingan di industri perbankan syariah? Bagaimana dengan era disruptif yang tengah berlangsung saat ini?

Kalau antarbank syariah, saya selalu berbicara kepada rekan sesama bank syariah, kenapa kita harus saling bersaing, padahal sama-sama masih kecil. Sebelum bersaing satu sama

lain, lebih baik jika bersama kami membangun pasar yang lebih besar. Terlebih lagi, potensinya yang sangat luas tadi.

Terkait dengan disrupsi, saya melihat *fintech* bukan pesaing, melainkan potensi. Perbankan syariah pada umumnya tidak memandang *fintech* sebagai tantangan, apalagi ancaman semata. Itu adalah dinamika bisnis yang wajar terjadi. Terutama, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan.

Seperti apa potensinya?

Dengan sinergi bersama, semua pihak akan diuntungkan. Perbankan syariah, perusahaan *fintech*, dan nasabah mendapat *benefit* darinya. Dari sinergi ini, perbankan syariah mendapatkan peluang-peluang bisnis baru. Perbankan syariah akan terdorong untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dari sisi teknologi informasi (TI), operasional, *business process*, sehingga bisa atau mampu menjawab tantangan dan tuntutan layanan yang lebih mengarah ke *digital banking*.

Dari sisi pembiayaan, pengembangan diperlukan dalam hal pemanfaatan teknologi untuk percepatan proses pembiayaan. Ujung-ujungnya adalah perbaikan pelayanan dan percepatan proses pembiayaan untuk memenuhi ekspektasi nasabah yang terus meningkat.

Bagi *fintech* sendiri, sinergi dengan perbankan, termasuk perbankan syariah, merupakan strategi untuk melebarkan bisnisnya. Bagaimanapun, transaksi perusahaan *fintech* dengan konsumennya tetap memerlukan media perbankan sebagai sarana *settlement* dan aktivitas keuangan untuk operasional perusahaan.

Bagi konsumen/nasabah, sudah jelas manfaatnya. Sinergi perbankan syariah dan *fintech* akan makin memudahkan konsumen dan nasabah dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari transaksi belanja, transportasi, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya.

Bagaimana kinerja perbankan syariah nasional pada 2018?

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, diprediksi pertumbuhan pembiayaan dan pendanaan akan lebih baik pada 2018. Pembiayaan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10%-12%. Sementara itu, DPK diprediksi tumbuh pada kisaran 9%-11%. Bahkan, jika mengacu pada pertumbuhan pembiayaan dan DPK pada 2017, bisa jadi perbankan syariah tumbuh lebih dari itu.

Untuk DPK, perbankan syariah banyak ditolong dengan keberadaan UU (Undang-Undang) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah bank syariah dan bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Melalui peraturan tersebut, semua transaksi terkait dengan haji harus di bank syariah.

Pada waktu peraturan tersebut belum berlaku, pengumpulan dana dari masyarakat dan institusi porsinya cukup besar. Namun, setelah dana haji harus ditampung, otomatis dana yang lebih mahal kami lepas. Kenapa kami lakukan, karena untuk menyalurkan dana tersebut lebih lambat dibandingkan dengan laju masuknya dana.

Padahal, dana umat ini harus hati-hati untuk disalurkan. Selain produktif, pembiayaan menggunakan dana haji harus halal. Oleh karena itu, hampir semua bank syariah, terutama bank pemerintah, kelebihan liabilitas.

Apa saja strategi dan kebijakan yang mesti diterapkan pada 2018 dan ke depan?

Sesuai dengan tantangan yang dihadapi perbankan syariah, ada beberapa strategi yang layak dikedepankan pada 2018. Pertama, pengelolaan kualitas pembiayaan melalui upaya-upaya yang lebih terarah menyangkut penurunan kredit bermasalah (*NPF*). Kedua, peningkatan efisiensi melalui perbaikan struktur pendanaan yang didominasi *current account saving account (CASA)* dan upaya-upaya efisiensi operasional.

Ketiga, komunikasi publik harus makin masif untuk memperkenalkan produk dan layanan bank syariah kepada masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sarana komunikasi, termasuk pemanfaatan jejaring sosial untuk merangkul kaum *millennial*. Terakhir, pengembangan *digital banking* melalui adaptasi pembangunan teknologi keuangan terkini, aliansi dengan perusahaan *fintech*, serta optimalisasi *electronic channel* yang sudah dimiliki.

Ke depan, industri perbankan nasional akan seperti apa? Bagaimana dengan industri perbankan syariah?

Industri perbankan nasional saat ini sudah memiliki fondasi kuat. Tantangan perlambatan ekonomi pada tahun-tahun lalu dapat dilewati dengan kinerja yang meningkat. Ke depan, dengan kondisi ekonomi yang diprediksi tumbuh lebih tinggi, perbankan nasional, termasuk perbankan syariah, akan lebih bergairah lagi. Regulator menargetkan pertumbuhan perbankan nasional dua digit.

Industri perbankan syariah lebih optimistis lagi. Pada saat perbankan konvensional tumbuh *single digit*, perbankan syariah mampu bertumbuh dua digit. Selain tren pertumbuhan ekonomi yang positif, optimisme perbankan syariah ditunjang oleh dukungan pemerintah yang cukup kuat.

Secara internal juga ada penguatan di sisi sumber daya insani, *operation*, TI, dan pelaksanaan *good corporate governance (GCG)*. Selain itu, pemerintah memberi peluang dan kepercayaan kepada bank syariah untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya untuk bank konvensional. Dukungan makin nyata ketika Presiden



menyuarakan aspirasi komunitas perbankan yang meliputi seluruh entitas perbankan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, di satu sisi perbankan merupakan entitas bisnis yang memerlukan *environment* kondusif bagi pertumbuhannya. Di lain sisi, perbankan merupakan satu subsistem dalam ekonomi dan keuangan yang mendukung pembangunan nasional melalui fungsi *intermediary*-nya. Dua fungsi yang saling terkait langsung tidak terpisahkan satu sama lainnya. Keberhasilan pelaksanaan kedua fungsi tadi menjadi harapan kita semua.

Khusus untuk perbankan syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang berada di bawah Perbanas menjadi media komunikasi dan sinergi. Contoh salah satu langkah sinergi adalah saling (memberi) informasi terkait dengan proyek tertentu yang bisa dibiayai oleh bank-bank syariah.

Di Perbanas Anda menjadi Wakil Ketua Umum yang mewakili bank umum syariah. Bagaimana peran Anda di Perbanas dan misi apa yang akan disampaikan perbankan syariah ke Perbanas?

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar pendukung Perbanas. Kehadiran perbankan syariah di

Perbanas merupakan representasi industri perbankan syariah yang terus tumbuh. Lewat Perbanas, perbankan syariah bisa menyuarakan aspirasinya dalam rangka pengembangan bisnis dan peningkatan fungsi.

Sebagai pimpinan dari unsur perbankan syariah, saya menggunakan dan mengoptimalkan forum Perbanas sebagai jembatan untuk mempererat komunikasi dengan komunitas perbankan lainnya. Perbankan syariah tidak dapat berkembang sendiri tanpa menjalin komunikasi dan sinergi dengan perbankan pada umumnya. Tanpa komunikasi dan kerja sama yang terjalin erat, industri perbankan syariah tidak akan berkembang maksimal. ■

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar pendukung Perbanas. Kehadiran perbankan syariah di Perbanas merupakan representasi industri perbankan syariah yang terus tumbuh. Lewat Perbanas, perbankan syariah bisa menyuarakan aspirasinya dalam rangka pengembangan bisnis dan peningkatan fungsi.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH ("bank bjb syariah")

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya: dengan ini PT Bank Jabar Banten Syariah ("bank bjb syariah") mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut:

Tahun 2017: Rp96.639.642.630,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung bersama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.

Informasi Penting kepada Direktorat Jendral Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih:

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di bank bjb syariah agar masing-masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Bank bjb syariah senantiasa memenuhi Undang - Undang Perpajakan dan Undang - Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila bank bjb syariah dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada bank bjb syariah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini.
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi bank bjb syariah di tahun pajak 2016. Demi keadilan, apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjutinya kepada Debitur yang bersangkutan.
4. Bank bjb syariah telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan.
5. Piutang yang nyata - nyata tidak dapat tertagih ini merupakan Keuangan Negara yang dikelola berdasarkan peraturan dan ketentuan internal bank bjb syariah. Segala tindakan, kebijakan, penetapan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi bank bjb syariah, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang - Undang beserta peraturan dan ketentuan berlaku.
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang - Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Reformulasi GWM Averaging

Pemberlakuan reformulasi GWM *averaging* dinilai berdampak pada likuiditas perbankan. Bank-bank bisa mengelola likuiditasnya dengan lebih leluasa.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada pertengahan Januari 2018 memutuskan untuk mempercepat implementasi giro wajib minimum rata-rata (GWM *averaging*). Penyempurnaan GWM rata-rata merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh BI sejak 2016.

Langkah tersebut diambil untuk makin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Berbagai sasaran ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Menurut Dody Budi Waluyo, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, BI mengubah GWM *averaging* rupiah untuk bank umum konvensional sebesar 6,5% dari yang sebelumnya terbagi dalam dua skema, yakni GWM rata-rata dari 1,5% menjadi 2% dan GWM tetap dari 5% menjadi 4,5%. Aturan ini mulai berlaku pada 16 Juli 2018.

“Dengan adanya kebijakan ini, artinya bank umum punya ruang dua minggu untuk GWM rata-rata sebesar 2%. Manfaatnya menambah kemampuan likuiditas perbankan karena dengan *averaging* bank punya ruang agar lebih efektif,” jelas Dody.

BI juga mengubah implementasi GWM rata-rata valuta asing (valas) untuk bank umum konvensional, dari sebelumnya GWM tetap 8% menjadi GWM tetap 6% dan GWM rata-rata 2%. Kebijakan ini akan diberlakukan pada 1 Oktober 2018. Tak hanya itu, GWM rata-rata rupiah bank syariah juga disempurnakan, dari sebelumnya GWM tetap 5% menjadi GWM tetap 3% dan GWM rata-rata dari 0% menjadi sebesar 2%. Kebijakan ini pun akan diberlakukan pada 1 Oktober 2018.

Untuk menambah ruang gerak bagi likuiditas perbankan dan pendalaman pasar keuangan, BI melakukan penyempurnaan pada penihilan jasa giro, dari sebelumnya 2,5% (dari 1,5% GWM) direformulasi menjadi 0%. Kebijakan ini akan diberlakukan pada 16 Juli 2018.

Penyempurnaan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan likuiditas perbankan. BI memperkirakan, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, akan ada penambahan sekitar Rp20 triliun. “Karena ada



Front office bank; menambah ruang gerak likuiditas perbankan

GWM *averaging* dua mingguan, ada *room* sekitar Rp20-an triliun dari GWM *averaging* terhadap rupiah, valas, maupun syariah,” terang Dody.

Masih Ada yang Belum Mengimplementasikan

Sekadar catatan, perubahan aturan dari GWM primer menjadi GWM rata-rata dilakukan BI dan mulai berlaku efektif per 1 Juli 2017. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

Lalu, apa perbedaan GWM primer dan GWM rata-rata? Dalam GWM primer, bank wajib memenuhi GWM secara harian sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah. Sedangkan, dalam GWM *averaging*, penghitungannya terbagi dua, yakni GWM yang wajib dipenuhi secara harian dan GWM dari jumlah rata-rata DPK rupiah selama dua pekan.

BI mendorong pelaku industri perbankan untuk mulai menerapkan GWM *averaging*. Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan bank lebih fleksibel mengelola keuangannya sehingga menambah ruang untuk pendalaman pasar keuangan.

Walau disambut baik oleh kalangan industri perbankan dan dinilai memberikan dampak positif, ternyata belum semua bank menerapkan kebijakan tersebut. Sejumlah bank tetap setia dengan pola pemenuhan GWM primer dengan menjaga GWM harian di level 6,5%.

SUBSTANSI	LAMA	BARU	PEMBERLAKUAN
Tambahan GWM Rata-Rata Rupiah Bank Umum Konvensional	GWM tetap: 5% GWM rata-rata: 1,5% GWM: 6,5%	GWM tetap: 4,5% GWM rata-rata: 2% GWM: 6,5%	16 Juli 2018
Penilaian Jasa Giro	2,5% (dari 1,5% GWM)	0%	16 Juli 2018
Implementasi GWM Rata-Rata Valas Bank Umum Konvensional	GWM tetap: 8% GWM rata-rata: 0% GWM: 8%	GWM tetap: 6% GWM rata-rata: 2% GWM: 8%	1 Oktober 2018
Implementasi GWM Rata-Rata Rupiah Bank Syariah	GWM tetap: 5% GWM rata-rata: 0% GWM: 5%	GWM tetap: 3% GWM rata-rata: 2% GWM: 5%	1 Oktober 2018

Sumber: Bank Indonesia

Misalnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan PT Bank Dinar Tbk dari kelompok BUKU 2. Direktur Keuangan dan *Treasury* BTN, Iman Nugroho Soeko, beralasan, pihaknya tak memanfaatkan GWM *averaging* lantaran likuiditas perseroan kerap kali tak berbeda jauh dengan pasar.

“GWM rata-rata memang memberikan fleksibilitas dalam menjaga GWM. Hanya saja, untuk BTN, historisnya kalau likuiditas pasar ketat, likuiditas BTN juga ketat. Kalau *market* longgar, BTN juga longgar. Jadi, mengikuti pasar. Sehingga, untuk BTN, ya sepanjang waktu kami usahakan GWM di level 6,5%,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Dinar, Hendra Lie, mengatakan, meski pelonggaran GWM *averaging* dipandang baik, pihaknya tak memanfaatkan relaksasi tersebut. “Kalau untuk Bank Dinar, rata-rata GWM tidak besar sehingga kami langsung menjaga GWM primer di atas 6,5%. Kami jarang memanfaatkan *averaging*-nya,” terangnya.

Menurut Hendra, dari segi nominal, tambahan kelonggaran likuiditas yang didapat dari sistem rerata 1,5% tidak terlalu signifikan untuk dimanfaatkan di pasar uang. “Persentase 1,5% itu tidak besar untuk nilainya. GWM primer kami sekitar Rp128 miliar,” tambahnya.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Yoga Affandi, membenarkan bahwa belum semua bank memanfaatkan relaksasi GWM *averaging*. Merujuk pada catatan BI, hingga saat ini bank yang mengikuti mekanisme GWM *averaging* sebanyak 49 bank umum konvensional. Namun, menurut Yoga, jumlah tersebut sudah terbilang besar. “Kami melihatnya bukan ‘hanya 49’, melainkan ‘sudah 49’ bank pemanfaat GWM *averaging* atau sekitar 48% dari 102 bank. Jadi, sudah cukup banyak bank dalam kurun waktu singkat sehingga kami mau dorong lagi,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan momentum relaksasi di tengah kondisi likuiditas yang masih cukup longgar, Yoga berpandangan bahwa keputusan reformulasi GWM *averaging* tidak hanya didasarkan pada kondisi dalam negeri. Menurutnya, langkah itu diambil sebagai antisipasi terhadap tekanan eksternal dari kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate (FFR)* dan perebutan dana antara pemerintah dan perbankan yang membuat likuiditas berpotensi mengetat.

Ditambah lagi, akan ada rencana peningkatan penerbitan surat utang baru oleh pemerintah pada 2018 yang akan menyebabkan likuiditas pada paruh kedua tahun ini berpotensi berkurang. “Kami lakukan perbandingan dengan situasi di luar negeri juga. Likuiditas bank di Indonesia perlu dijaga agar tetap longgar,” ungkapnya. ■



Bank Sahabat
Sampoerna

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Sahabat Sampoerna mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2017: Rp224.029.108.370,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank Sahabat Sampoerna, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

AFIN Workshop 2018

Menindaklanjuti agenda ASEAN Banking Council Meeting di Da Nang, Vietnam, pada 23-24 November 2017, Perbanas menggelar “ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) Workshop” di Griya Perbanas, Jakarta, pada 7 Maret 2018. *Workshop* ini menjadi salah satu program yang dicanangkan ASEAN Banking Association (ABA) dengan tujuan memberikan informasi sekaligus menggali respons anggota Perbanas atas penerapan AFIN.

Workshop diawali dengan sambutan Paul Gwee, Sekretaris Jenderal ABA. Farid Rahman, Wakil Ketua Perbanas yang mewakili Perbanas, dalam sambutannya menyampaikan respons positif atas keterlibatan beberapa pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini. *Workshop* yang diisi dengan pemaparan materi dan diskusi ini menghadirkan pembicara Sopendu Mohanty, *Chief Fintech Officer* Monetary Authority of Singapore; Ivan Mortimer-Schutts, *Regional Leader for Retail Payments and Mobile Banking in East Asia*, IFC; Darryl Tan, *Co-Founder of KYCK!*; Tom DeLuca, *chief executive officer (CEO)* AMP Credit Technologies; dan Myles Hosford, Amazon Web Services. Adapun, peserta yang hadir dalam *workshop* ini adalah pengurus Perbanas, pengurus Ikatan Bankir Indonesia (IBI), pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang perbankan, serta *chief information technology officer (CIO)* dan direktur bank-bank anggota Perbanas. ■



Tahun Baru Imlek di Perbanas Sumut

Perbanas Sumut ingin memberikan makna tersendiri menyambut Tahun Baru Imlek 2018. Kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada Perguruan Bodhicitta dikemas untuk menyambut hari istimewa ini.

Menyambut Tahun Baru Imlek 2018 (Tahun 2569 Imlek), Perbanas Sumatera Utara (Sumut) mengadakan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan dalam bentuk paket Imlek dan *angpao* kepada seratus anak asuh Perguruan Bodhicitta di Medan, Sumut, pada 29 Januari 2018. Niat baik ini disambut dengan tangan terbuka oleh YM Biksu Nyanaprathama, Pembina dan Pendiri Program Anak Asuh Mettajaya Perguruan Bodhicitta.

Program yang dikelola perguruan yang berlokasi di Medan dan Binjai ini membuahkan hasil yang menggemirakan. Menurut YM Biksu Nyanaprathama, setelah dua puluh tahun program ini dicanangkan, perguruan sudah mencetak sekitar seribu sarjana. Bahkan, sudah ada yang melanjutkan ke jenjang strata dua dan meneruskan pendidikan ke Taiwan.

Pada praktiknya, program anak asuh ini menerima anak-anak yang memenuhi syarat tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Menurut YM Biksu Nyanaprathama, dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah anak asuh mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup anak-anak sudah meningkat. Bahkan, ada anak asuh yang setelah dewasa memiliki anak asuh. Didampingi Sutini, Direktur Program Anak Asuh Mettajaya, saat menerima rombongan Perbanas Sumut, YM Biksu Nyanaprathama menyatakan bahwa program ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dari Aceh untuk melanjutkan jenjang pendidikan strata dua ke Taiwan.

Prestasi yang dicapai Perguruan Bodhicitta ini menjadi pertimbangan Perbanas Sumut mengadakan bakti sosial (baksos) di lembaga ini. Rasa puas karena memilih sasaran yang tepat untuk baksos diungkapkan Thomas Cipta Kusuma, Ketua Perbanas Sumut, saat memberikan bantuan pada perguruan yang terletak di Jalan Selam, Medan.

Pengurus Perbanas Sumut yang ikut serta dalam baksos ini adalah Tonny Indra Wijaya, anggota Dewan Pengawas; Lie Cian, Bendahara; Joelina David, Sekretaris; dan Denny Muljono, Ketua Bidang Humas dan Organisasi. Selain pengurus, hadir beberapa perwakilan bank anggota Perbanas Sumut, yakni Jusri Buhali, Meri Suriani, dan Catherine Goi. Baksos menjadi agenda rutin Perbanas Sumut saat merayakan hari raya keagamaan. ■





PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
("Bank Jatim")

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2017 : Rp 145.472.440.370,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di **Bank Jatim** agar masing – masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. **Bank Jatim** senantiasa memenuhi Undang – Undang Perpajakan dan Undang – Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank Jatim** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank Jatim** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank Jatim** di tahun pajak 2017. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;
4. **Bank Jatim** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;
5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank Jatim**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi **Bank Jatim**, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.



**MASIH BINGUNG
KULIAH DIMANA ??**

LET'S JOIN WITH PERBANAS INSTITUTE

Perbanas Institute merupakan kampus swasta terbaik dan kampus swasta terfavorit (survey Tempo 2017) memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknologi Informasi yang Terakreditasi A

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- S1 Akuntansi
- S1 Manajemen
- S1 Ekonomi Syariah
- D3 Akuntansi Perpajakan
- D3 Keuangan dan Perbankan
- S1 Ekstensi (Kelas Lanjutan)

Fakultas Teknologi Informasi

- S1 Teknik Informatika -
- S1 Sistem Informasi -
- S1 Sistem Komputer -
- S1 Ekstensi (Kelas Lanjutan) -

**JOB
GUARANTEE**

